

**KONFLIK NORMA REGULASI TATA KELOLA EKSPOR PASIR LAUT
TESIS**



Oleh:

Ahmad Muchlisin

02040422001

Dosen Pembimbing I:

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP: 195904041988031003

Dosen Pembimbing II:

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si

NIP: 197803152003121004

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muchlisin

NIM : 02040422001

Prodi : Magister Hukum Tata Negara

Judul Tesis : Konflik Norma Regulasi Tata Kelola Ekspor Pasir Laut.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Ahmad Muchlisin

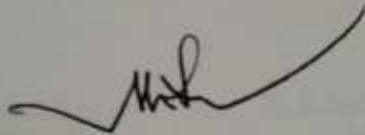
02040422001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "Konflik Norma Regulasi Tata Kelola Ekspor Pasir Laut" yang ditulis oleh Ahmad Muchlisin, NIM. 02040422001 ini telah disetujui pada tanggal 28 Maret 2024.

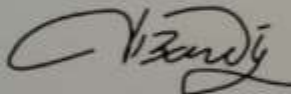
Oleh:

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag. M.Si
NIP: 197803152003121004

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Muchlisin, NIM 02040422001 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasyah Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana strata dua dalam prodi Magister Hukum Tata Negara.

Majelis Sidang Munaqasah:

Ketua Penguji

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Sekretaris Penguji

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004

Penguji I

Prof. Dr. H. Abd. Chalib, M.Ag.
NIP. 197306272000031002

Penguji II

Prof. Dr. Sri Warjivati, S.H., M.H.
NIP. 196808262005012001

Surabaya,
Mengesahkan,
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Direktur Pascasarjana,



Prof. H. Muband Hilmy, M.Ag., Ph.D
NIP. 1963021996031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Muchlisin
NIM : 02040422001
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : ahmadmuchlisin6969@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONFLIK NORMA REGULASI TATA KELOLA EKSPOR PASIR LAUT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Januari 2025

Penulis



(Ahmad Muchlisin)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

The research entitled "Conflict in Regulatory Norms for Sea Sand Export Management" is the result of legal research referring to the problem of how the norms of government regulation number 26 of 2023 concerning the management of sedimentation products in the sea conflict with law number 32 of 2009 concerning environmental control and management. and how to resolve conflicts regarding norms of government regulation number 26 of 2023 concerning the management of sedimentation results in the sea.

The research in this thesis uses normative legal research. The object of this research is laws and regulations related to conflicting regulatory norms for sea sand export governance in Indonesia. This research uses a legislative research approach, a conceptual approach, and a legal comparative approach. The technique for collecting legal materials in this research uses literature study, through sources of legal materials including law number 32 of 2009 concerning environmental control and management, statutory regulations related to sea sand mining, books, theses/ theses/dissertations, newspapers, magazines, other newspapers, other laws and regulations, scientific papers in the form of related scientific journals and others, as well as data that supports this research. Then the data was analyzed in a descriptive-qualitative manner using deductive methods.

The research results obtained include government regulation number 26 of 2023 concerning management of sedimentation results in the sea, which is inconsistent with law number 32 of 2009 concerning control and management of the environment and resolution of conflicting norms of government regulation number 26 of 2023 concerning management of sedimentation results in This must be done in the sea, which is shown in the regulations regarding the management of sea sand exports which include several shortcomings, including the government's lack of readiness in managing sea sand mining, the lack of clarity regarding the purpose of this policy, many of the sentences are has multiple interpretations which can trap people's logic between environmental health and marine ecosystems or sea sand mining, this policy does not take into account the short-term profits and long-term losses that will be experienced by the country.

Keywords: Norm conflict, regulations, sea sand exports

ABSTRAK

Penelitian berjudul **“Konflik Norma Regulasi Tata Kelola Ekspor Pasir Laut”** ini merupakan hasil penelitian hukum merujuk pada permasalahan tentang bagaimana konflik norma peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana penyelesaian konflik norma peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Penelitian pada tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. Objek dari penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konflik norma regulasi tata kelola ekspor pasir laut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Literature Study*), melalui sumber bahan hukum antara lain undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan terkait pertambangan pasir laut, buku-buku, skripsi/tesis/disertasi, koran, majalah, surat kabar lain, peraturan perundang-undangan lain, karya tulis ilmiah berupa jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dan lain-lain, serta data-data yang mendukung penelitian ini. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain adalah peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut inkonsisten dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian terhadap konflik norma peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini harus dilakukan, yang ditunjukkan pada regulasi mengenai tata kelola ekspor pasir laut yang meliputi beberapa kekurangan antara lain kurang kesiapan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan pasir laut, kurang jelasnya peruntukan kebijakan ini, banyak memiliki kalimat yang bersifat multi tafsir yang dapat menjebak logika masyarakat antara demi kesehatan lingkungan dan ekosistem laut atau pertambangan pasir laut, kebijakan ini tidak memperhitungkan keuntungan jangka pendek dan kerugian jangka panjang yang akan dialami negara.

Kata Kunci: Konflik norma, regulasi, ekspor pasir laut

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Kegunaan Penelitian.....	17
F. Penelitian Terdahulu.....	18
G. Kerangka Teoritik.....	19
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KONFLIK NORMA	
A. Teori Konflik Norma.....	26
1. Definisi Teori Konflik Norma	26
2. Bentuk-Bentuk Teori Konflik Norma	29
3. Sejarah Teori Konflik Norma	39
4. Faktor Teori Konflik Norma.....	40
5. Konflik Norma Dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	40
B. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	42
1. Definidi Teori Peraturan Perundang-undangan	42
2. Sejarah Teori Peraturan Perundang-undangan.....	43
3. Susunan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	52
4. Peraturan Perundang-undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	56

**BAB III KONFLIK NORMA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL
SEDIMENTASI DI LAUT DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

- A. Konflik Norma Antara Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 60
- B. Konflik Norma Antara Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 71
- C. Konflik Norma Antara Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 79

**BAB IV ANALISIS KONFLIK NORMA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT**

- A. Konflik Norma Regulasi Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut..... 90
- B. Penyelesaian Konflik Norma Regulasi Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut..... 98

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 105
- B. Saran..... 107

DAFTAR PUSTAKA 108

LAMPIRAN.....

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-undang dasar 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor I/MPR/2003 tahun 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 2002 tentang Pengendalian, pengawasan, pengusaha, pengangkutan dan penambangan ekspor pasir laut.

Keputusan Presiden nomor 107 tahun 2000 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor SKB.07/MEN/j/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut, yang menggantikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01/MENLH/2/2002.

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang Barang dilarang Ekspor dan barang dilarang Impor.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, (Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*. (Yogyakarta: Fakultas Universitas Islam Indonesia, 2004).

Bagir Manan, *Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan*. (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008).

Hans Nawiasky, *Allgemeine als recht System Lichen Grundbegriffe*, (Ensiedeln /Zurich/koln, benziger, cet. 2 1948).

Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, (Wien: Manz, 1960).

Hans Kelsen, *Law and Logic*, (Wien: Manz, 1965).

Hans Kelsen. *Allgemeine der Normen*, (Wien: Manz, 1979).

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Op. Cit.,)

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin*, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010).

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009).

Jörg Kammerhofer, *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective*, (London & New York: Routledge, 2010).

Michal Araszkiwicz dan Krzysztof Pleszka, *Logic in the Theory and Practice of Lawmaking*, (Switzerland: Springer International Publishing, 2015).

Moh. Mahfud M. D, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindu Persada, 2009).

Ni`matul Huda, *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2005).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2011).

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).

R&D, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-undangan*, (Makassar: Kretakupa, 2017).

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020).
- United Nations, *Yearbook of the International Law Commission 2006*, Volume II Part Two, (New York and Geneva: United Nations, 2013).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Jurnal

- Aditya, R., & Tarigan, T. M. (2023). Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqh Siyasa Syar'iyah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3).
- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Respon dunia barat terhadap ekonomi syariah di era revolusi industri 4.0. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Akbar, A. A., Sartohadi, J., Djohan, T. S., & Ritohardoyo, S. (2017). Erosi pantai, ekosistem hutan bakau dan adaptasi masyarakat terhadap bencana kerusakan pantai di negara tropis. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1).
- Al Farisi, M. S. (2021). Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(1).
- Awan, F. N., & Mulya, M. B. (2020). Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Niara*, 13(1).
- Arianto, M. F. (2020). Potensi wilayah pesisir di negara Indonesia. *Jurnal Geografi*, 10(1).
- Arliman, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*.
- Artiningsih, A., Putri, N. C., Muktiali, M., & Ma'rif, S. (2019). Skema pembiayaan pembangunan infrastruktur non-konvensional di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 13(2).
- Bara, N. I. B., Fadlia, F., & Sari, N. (2022). Perspektif Pemerintah dan DPR-RI dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(1).
- Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4).
- Bintari, A., & Muara, T. (2018). Manajemen konflik penyelesaian kasus reklamasi pulau g pantai utara jakarta. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1).
- Budiana, B., Sujatnika, D. A., Nasrudin, A., & Nurhakim, M. S. (2023). Mitigasi Kebencanaan Dengan Pendekatan Nilai Pendidikan Islam di Kalangan Milenial Daerah Pesisir Pantai Labuan Pandeglang, Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(001).
- Chikmawati, N. F. (2013). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2).
- Christiani, T. A. (2008). Studi Hukum Berdasarkan perkembangan paradigma pemikiran hukum menuju metode holistik. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4).
- Dewi, N. S., Avita, F. D., & Putri, H. J. V. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional. *Indonesian Journal of Law*, 1(1).
- Dewi, R. A. K. P., Dewi, N. P., & Rizqayanti, D. (2023). Interaksi Sosial Dalam Konteks Ekonomi: Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5).
- Ernas, S., & Qodir, Z. (2013). Agama dan Budaya dalam Integrasi Sosial (Belajar dari Pengalaman Masyarakat Fakfak di Propinsi Papua Barat). *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume*, 2(2).
- Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sisitem Hukum Barat). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3).
- Fendri, A. (2011). Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Fuqoha, Farhan Nugraha, Dina Aulia Sholehah, Siti Kamila Khaerunnisa, Harmonisasi regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diantara kesejahteraan sosial dan kepentingan nasional, *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*, Vol. 3, No. 1 (Februari 2023).
- Giovanni Sartor, (1992), *Normative Conflicts in Legal Reasoning, Artificial Intelligence and Law 1*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Hartanto, B., & Sartini, S. (2019). KEBIJAKAN PEMANFAATAN ENERGI DAN SUMBERDAYA ENERGI MINERAL KELAUTAN INDONESIA. *Jurnal Baruna Horizon*, 2(2).
- Haryanti, "Dekonstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2015).
- Ibnu Sina Chandranegara. Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 Nomor 3 (2019).
- Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1).

- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3).
- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2).
- Ismail, H. A., & Kartika, E. (2019). Peran Kemaritiman Indonesia di Mata Dunia. *Jurnal Sains dan Teknologi Maritim*, 20(1).
- Jaap C. Hage, (1997), Reasoning with Rules: an Essay on Legal Reasoning and Its Underlying Logic. *Dordrecht: Kluwer Academic Publishers*.
- Jatmika, B. J. (2020). Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law. JAAKFE UNTAN, *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 9(1).
- Joel P. Trachtman, (2013), The Tools of Argument: How the Best Lawyers Think, Argue, and Win, South Carolina: *Createspace Independent Publishing*.
- Karimah, K. (2017). Peran Ekosistem Hutan Mangrove sebagai Habitat untuk Organisme Laut. *Jurnal Biologi Tropis*.
- Kartamihardja, E. S., Purnomo, K., & Umar, C. (2017). Sumber daya ikan perairan umum daratan di Indonesia-terabakan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 1(1).
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1).
- Khairina, E., Purnomo, E. P., & Malawani, A. D. (2020). Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2).
- Kristian, D. (2020). Upaya Permohonan Putusan Fiktif Positif Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Lingkup Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum, Jurnal Hukum*, 8(1).
- Kurniawan, F. (2024). Transformasi Sistem Penemuan Hukum: Implikasi dan Dampaknya Terhadap Hukum Di Indonesia. *Journal Transformation of Mandalika*, 5(1).
- Laming, S., & Rahim, M. (2020). Dampak Pembangunan Pesisir Terhadap Ekonomi Dan Lingkungan. *Jurnal Sipil Sains*, 10(2).
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal ilmiah platax*, 1(2).
- Luthan, S. (2012). Dialektika hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4).
- M. Syamsudin, Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica. Al Qisthas: *Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Vol. 9, No. 1 (2018).
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(1).
- Maiwan, M. (2017). Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(1).
- Manullang, S. O., br Tompul, V., Kusumadewi, Y., Krisnalita, L. Y., & Mutiarany, M. (2023). Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2).
- Marasabessy, I., Fahrudin, A., Imran, Z., & Agus, S. B. (2018). Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Laut Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Leun di Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning, Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 2(1).
- Maswanto, A. R., & Anam, A. K. (2021). Nalar Hukum Prismatic Dalam Konteks Hukum Nasional. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 4(2).
- Mattalatta, A. (2018). Politik Hukum Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4).
- Mazaya, M., & Michael, T. (2024). Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1).
- Meutia, R., & Rizal, S. (2022). Pengaruh Pengembangan Wisata Bahari terhadap Pendapatan Masyarakat di Pulau Dua Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).
- Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2).
- N. Al Hidayat & M. Sari, (2018), Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), Vol. 7, No. 3.
- Nurfaqih Ifrani, "Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior dalam penalaran dan argumentasi hukum), *Jurnal Legislasi Indonesia*, (2020).
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5).

- Purwanto, F. (2014). Pruralitas Pemahaman Akan Identitas Gereja Katolik: Perkembangan Pembaruan Eklesiologi Gereja Katolik Roma. *Jurnal Teologi* (Journal of Theology), 3(2).
- Qodriyatun, S. N. (2019). Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 8(2).
- Rahadian, R. (2022). Keterkaitan Pasal RUKUHPIDANA dengan Cyber Law, Sebagai Pelaksana Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. *Buana Ilmu, Jurnal Hukum*, 7(1).
- Rizkia, N. D. (2023). Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional, *Jurnal Intelektual Sosial Hukum*, 1(1).
- Rejekiingsih, T. (2016). Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di Indonesia). *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2).
- Robert W. Shaffern, (2009), *Law and Justice from Antiquity to Enlightenment*, Maryland: Rowman and Littlefield Publishers.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1).
- Roza, D. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3).
- Safitri, B., & Setiawati, D. (2022). KONTRIBUSI PERADABAN BANGSA BABILONIA DALAM PERKEMBANGAN BUDAYA PADA ABAD 21. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya*, 1(2).
- Sagala, F. T. Z. (2021). Peran Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization) Melalui Konvensi Di Bidang Kemaritiman Dalam Lalulintas Perdagangan Internasional Di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 7(2).
- Salim, D. (2012). Pengelolaan ekosistem terumbu karang akibat pemutihan (Bleaching) dan rusak. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 5(2).
- Sandang, Y., & Wijayanto, E. (2017). Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick dan John Rawls (Sebuah Komparasi Pemikiran). *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, 4(1).
- Sari, D. L. I. (2023). KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT PASCA DIUNDANGKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 BERDASARKAN PRESPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2).
- Sari Nainggolan, P. (2018). Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) di Desa Sayur Matuakecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Buana*, 2(3).
- Sayudi, A., & Wijaya, S. (2022). KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI DELEGATION OF RULE MAKING POWER. *Jurnal Pelita Ilmu*, 16(02).
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2).
- Silalahi, R., & Luciana, R. (2019). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Darma Agung*, 27(3).
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Somad, K. A. (2017). Kedudukan Tap MPR RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(1).
- Sudjana, U. (2017). Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* (Journal of Law), 4(2).
- Suhartono, S. (2019). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2).
- Syafitri, H., & Warsono, W. (2021). Primordialisme dalam praktek demokrasi di organisasi kemahasiswaan (konflik sosial dalam pemira BEM Unesa 2020). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(3).
- Theo Mayer Maly. *Partes Iuris*, (2004), *Critical Studies in Ancient Law, Comparative Law and Legal History*, diedit oleh John W. Cairns dan Olivia F. Robinson, Oregon: Hart Publishing.
- Thontowi, J. (2011). Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religius Science: Dekonstruksi Filsosofis Pemikiran Hukum Positivistik. *Pandecta Research Law Journal*, 6(2).
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1).
- Yuniardi, R., Suharyanto, Y., & Satory, A. (2024). Dampak Penyederhanaan Perizinan Lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Masyarakat Serta Pelaku Usaha. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1).

- Yusuf, M. (2022). Keberlakuan Peraturan Dalam Undang-Undang Yang Tidak Kunjung Diterbitkan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksanaannya. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(1).
- W. M, dkk berjudul. (2018). Encyclopedia of geochemistry: A comprehensive reference source on the chemistry of the earth” *Jurnal white*.
- Wahyudi, W., Riani, E., & Anwar, S. (2018). Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Laut yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 10(2).
- Waluyo, A. (2014). Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura). *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 7(2).
- Yansen, H. D., Putri, L. Y., & Ramadhana, W. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN EKSPOR SEDIMENTASI LAUT (PASIR LAUT) TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(1).
- Zaka Firma Aditya, M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia,” *Jurnal Hukum*, (2018).
- Zaka Firma Aditya, Rekonstruksi Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.9 No. 1 (Juni 2018).

Sumber Internet

- Aceh Zone.com, 2007, “Sejarah Kalam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura,” <https://acehzone.com/sejarah-kelam-ekspor-pasir-laut-ri-pulau-hilang-demi-singapura/>; di akses tanggal 2 September 2023.
- Annisa Nabilatul Khaira, “Polemik peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023: Laut bunting, pemerintah untung”, Mahasiswa Magister Ilmu hubungan internasional UGM, 27 agustus 2023: <https://kumparan.com/annisa-nabilatul-khaira-1661926381089886817/polemik-peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2023-laut-bunting-oligarki-untung-20oeqxuxXxh/2>
- Antara, 2007, “Numberi Akui Dua Pulau Hilang Akibat Ekspor Pasir Laut,” <https://www.antaraneews.com/berita/63007/numberi-akui-dua-pulau-yang-hilang-akibat-ekspor-pasir-laut>; di akses 2 September 2023.
- Batam.co.id, 2023, “Perda RZWP3K Provinsi Kepri mangkrak dua tahun,” <https://kepri.batampos.co.id/perda-rzwp3k-provinsi-kepri-mangkrak-dua-tahun/>; di akses 28 September 2023.
- BBC News Indonesia, 2023, “Mengapa kebijakan ekspor pasir laut ditolak, pegiat lingkungan dan negara mana yang diuntungkan?” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0wv9q3q941o>; di akses 28 Oktober 2023.
- Betaria.id, 2023, “Di acara Lemhanas, Walhi usulkan PP pasir laut tahun 2023 dicabut,” <https://betahita.id/news/detail/9575/di-acara-lemhanas-walhi-usulkan-pp-pasir-laut-tahun-2023-dicabut.html?v=1701723727>; diakses 19 Desember 2023.
- Bisnis.com, 2023, “KKP terbitkan aturan turunan, keran ekspor pasir laut sudah dibuka?”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231109/99/1712819/kkp-terbitkan-aturan-turunan-keran-ekspor-pasir-laut-sudah-dibuka>; diakses 29 Desember 2023.
- CBCN, 2023, “Heboh ekspor pasir laut, Menteri ESDM buka suara,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230613183055-4-445619/heboh-ekspor-pasir-laut-menteri-esdm-buka-suara>; diakses 17 september 2023.
- CBCN, 2023, “Keran Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka Siapa yang Untung,” <https://www.youtube.com/watch?v=CR1f40sDUXA>; diakses 8 Agustus 2023.
- Eksiklopedia Dunia, 2019, “Reklamasi Daratan Singapura,” https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Reklamasi_daratan_di_Singapura; di akses 2 September 2023.
- Humas Pendidikan vokasi Universitas Indonesia, 2023. “Blue economy sebagai strategi pengembangan ekonomi maritim di Indonesia,” <https://vokasi.ui.ac.id/web/blue-economy-sebagai-strategi-pengembangan-ekonomi-maritim-di-indonesia/>; di akses 27 oktober 2023.
- Inganatul Muhimmah, 2021, “Menyoal Amdal dalam pembangunan berkelanjutan pasca uu cipta kerja,” <https://lamongankab.go.id/beranda/dlh/post/3423>; diakses 23 Desember 2023.
- Indonesian Ocean Justice Initiative, “IQJI apresiasi Langkah Pemprov Riau mencabut IUP Perusahaan Tambang Pasir Laut di Pulau Rupert,” <https://oceanjusticeinitiative.org/2023/11/06/ioji-apresiasi-langkah-pemprov-riau-mencabut-iup-perusahaan-tambang-pasir-laut-di-pulau-rupert/>; diakses 22 Desember 2023.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2004, “Pulau Nipah,” <https://pu.go.id/berita/pulau-nipah>; di akses 2 September 2023.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 8 April 2005, “Investor Singapura Tertarik Mengembangkan Pulau Karang Nipah,” <https://pu.go.id/berita/investor-singapura-tertarik-mengembangkan-pulau-karang-nipah>; diakses 11 September 2023.

- Kompas.com, 2023, "Penambangan pasir laut mengancam kelestarian lingkungan," <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/06/06/penambangan-pasir-laut-mengancam-kelestarian-lingkungan>; di akses 17 September 2023.
- Kompas.com, 2023, "Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut Ini Bahayanya." <https://www.youtube.com/watch?v=pzpErOS-0wk>; di akses 12 September 2023.
- Kompas.com, 2023, "Luhut berani garansi ekspor pasir laut tidak merusak lingkungan," <https://money.kompas.com/read/2023/06/01/105458526/luhut-berani-garansi-ekspor-pasir-laut-tidak-merusak-lingkungan>; diakses tanggal 20 Desember 2023.
- Lampung Geh, 2022, "Penambangan Pasir laut bisa ganggu program rajungan berkelanjutan di Lampung," <https://kumparan.com/lampunggeh/penambangan-pasir-laut-bisa-gangu-program-rajungan-berkelanjutan-di-lampung-1xVNeOfO5M9>; diakses 18 Desember 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Desember 2016, Sekjen MK: Tumpang Tindih Aturan Sebabkan Ketidakpastian Hukum, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13517&menu=2>; diakses 28 Desember 2023.
- Metrojambi.com, 2023, "DPR RI Minta Penjelasan Terkait PP Nomor 26 Tahun 2023, 'Kami Sama Sekali Tidak Tahu Menahu...'", <https://www.metrojambi.com/peristiwa/13809234/dpr-ri-minta-penjelasan-terkait-pp-nomor-26-tahun-2023-kami-sama-sekali-tidak-tahu-menahu>; diakses pada 21 Desember 2023.
- Ombudsman Republik Indonesia, "Kesesatan Regulasi PP 26 Tahun 2023, KKP Kini Jadi Sakti," <https://ombudsman.go.id/artikel/r/kesesatan-regulasi-pp-26-tahun-2023-kkp-kini-jadi-sakti>; di akses 11 September 2023.
- Ombudsman Republik Indonesia, "Kesesatan Regulasi PP 26 Tahun 2023, KKP Kini Jadi Sakti," <https://ombudsman.go.id/artikel/r/kesesatan-regulasi-pp-26-tahun-2023-kkp-kini-jadi-sakti>; di akses 11 September 2023.
- Reporter Unila, 2023, "Dampak penambangan pasir laut." <https://www.unila.ac.id/dampak-penambangan-pasir-laut/>; di akses 23 Oktober 2023.
- Republika, 30 Mei 2023, "Luhut: Ekspor pasir laut tak merusak lingkungan," <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rvguwb490/luhut-ekspor-pasir-laut-tak-merusak-lingkungan>; di akses 12 September 2023.
- Suara.com, 2023, "Kontroversi Jokowi buka lagi ekspor pasir laut, Susi Pudjiastuti mencak-mencak," <https://www.suara.com/news/2023/05/30/135040/kontroversi-jokowi-buka-lagi-ekspor-pasir-laut-susi-pudjiastuti-mencak-mencak>, di akses pada tanggal 30 september 2023.
- Tempo.com, Juli 2023, "Meski masih menuai pro kontra, KKP sebut PP No.26 tahun 2023 masih jalan," <https://bisnis.tempo.co/read/1745247/meski-masih-menuai-pro-kontra-kkp-sebut-pp-no-26-tahun-2023-masih-jalan>; diakses 23 Desember 2023.
- Tempo.com, 4 Juni 2023, "Pemerintah Sebut Penambangan Pasir Laut demi Kebutuhan Reklamasi dalam Negeri, Pengamat: Faktanya Eksploitasi Masif", [https://bisnis.tempo.co/read/1733153/pemerintah-sebut-penambangan-pasir-laut-demi-kebutuhan-reklamasi-dalam-negeri-pengamat-faktanya-eksploitasi-masif#:~:text=Dari%20perspektif%20Undang%20Undang%20Minerba,Kelautan%20dan%20Perikanan%20\(KKP\)](https://bisnis.tempo.co/read/1733153/pemerintah-sebut-penambangan-pasir-laut-demi-kebutuhan-reklamasi-dalam-negeri-pengamat-faktanya-eksploitasi-masif#:~:text=Dari%20perspektif%20Undang%20Undang%20Minerba,Kelautan%20dan%20Perikanan%20(KKP);); di akses 30 September 2023.

Artikel dan Surat Kabar

- Adiatma, I., Bambang, A. N., & Purnaweni, H. (2013). Peralihan mata pencaharian sebagai bentuk adaptasi (Studi kasus: Desa Batu Belubang, Bangka). *Teknik*, 34(2).
- Alamsjah, M. A. (2014). AKSELERASI BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DALAM SEKTOR PRODUKSI RUMPUT LAUT SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL DAN BLUE ECONOMY PROGRAM.
- Amri, I. F., Fadhilah, S. A., Minga, B. W., Andriani, K., & Ramdhani, D. S. (2023). Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut. *UNES Law Review*, 6(1).
- Arham, S., & Saleh, A. (2019). Omnibus law dalam perspektif hukum indonesia. *Petitum*, 7(2 Oktober).
- Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya, *Inilah.com*, Rabu (7/6/2023)
- Buli, W. (2018). Strategi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Melalui Pembinaan Kelembagaan Pertambangan Batubara Tanpa Izin Studi Kasus Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Daniar, M. S. (2016). Potensi Alam dan Kepariwisata Kepulauan Karimunjawa Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagai Medan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Focus Grup Discussion (FGD) kajian urgen dan cepat dengan tajuk "mekanisme peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut"
- Hidayat, F. I. (2020). Dampak Reklamasi Pantai dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut dan Masyarakat Pesisir. Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

- HALIM, M., Soeprbowati, T. R., & Hadiyanto, H. (2023). MITIGASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP EKOSISTEM MANGROVE PULAU KECIL DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Hasid, H. Z., SE, S., Akhmad Noor, S. E., SE, M., & Kurniawan, E. (2022). Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi. Cipta Media Nusantara.
- Huda, M. C. (2013). Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup. *Perspektif*, 18(2).
- Jamilah, U. (2021). Pengaruh Pajak, Nilai Tukar, dan Tunneling Incentive terhadap Harga Transfer pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA).
- Jauhari, A., & Surono, A. (2023, November). Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1).
- Navalia Caren, "Ekspor Pasir Laut: Ancaman atau Keberuntungan?", LK2 FHUI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2023.
- Nidyatri Putriana, "Studi Perbandingan Terhadap Efektifitas Materi Muatan Undang-undang nomor 10 tahun 2004 dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri ultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru).
- Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). Good environmental governance in indonesia (perspective of environmental protection and management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1).
- Penyebab konflik sosial (*resistensi*) masyarakat terhadap penambangan pasir laut
- Ramadhani, K., AP, A. M. B. M. K., Amalia, R., Sefina, M., Rahmat, W., Nabila, F., ... & Imran, M. R. (2023). Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT Dewangga Energi Internasional.
- Rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Senin (5/6/2023).
- Sehol, M., Armus, R., Gumirat, M. I. I., Purnomo, T., Mamede, M., Samai, S., ... & Indrawati, A. (2023). *Biologi Lingkungan*.
- Surianti, S., Asrim, A., & Wardana, R. (2023). Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan Dan Sosial-Ekonomi Di Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton. *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil UNIDAYAN*, 12(2).
- Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Perspektif*, 16(4).
- Tinambunan, H. S. R. (2016). Model pemberdayaan wilayah pesisir dalam menghadapi pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(2).
- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon memberikan sebuah pernyataan tentang pertambangan pasir laut.
- Windy Tatiana Cano dan Kyoungrean Kim berjudul "How to Achieve Sustainably Beneficial Uses of Marine Sediments in Colombia" (2022).